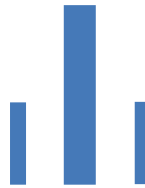




**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP BPP KEMENDAGRI
TAHUN 2014**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Tlp/Fax. (021)3924628.
Email: bagren_litbangddn@yahoo.com. Web: www.bpp.kemendagri.go.id



**© Hak cipta milik BPP Kemendagri, tahun 2015
Hak cipta dilindungi**

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,
baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya.

Kata Pengantar



Puji syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu organisasi/instansi berkewajiban menyusun laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berkewajiban pula menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung akuntabilitas Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2014 memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2014 yang merupakan implementasi dari rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2010-2014. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2014. Dengan demikian melalui LAKIP ini diharapkan akan dapat menyajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2014, selain itu LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2014 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Semoga LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2014 dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa akan datang.

Jakarta, Januari 2015
KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

AFRIADI SJAHBANA HASIBUAN

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Gambaran Organisasi	2
4. Aspek Strategis Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1. Rencana Strategis BPP 2010 - 2014.	7
2. Rencana Kinerja BPP Tahun 2014	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
1. Capaian Kinerja Tahun 2014.....	10
i. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPP Tahun 2010-2014.....	30
ii. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	32
iii. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	33
2. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	38
1. Kesimpulan	38
2. Saran-saran	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2014 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program – program jangka panjang Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan 2010 -2014, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAKIP adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian capaian kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan bersama sama dengan IKU Komponen lainnya lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2014 adalah :

- i. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri Tahun 2014



selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan.

- ii. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.
- iii. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2014.

Tujuan penyusunan LAKIP Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2014 adalah :

- i. Mewujudkan pertanggungjawaban akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Esselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2014.
- ii. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum.
- iii. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

3. GAMBARAN ORGANISASI

i. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

ii. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
- Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan

iii. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 terdiri dari :

Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi perumusan



perencanaan dan program, monitoring dan evaluasi, serta penyiapan rancangan dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan perpustakaan dan rekomendasi dan penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi peneliti dan perekayasa.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 dan optimalisasi peran penelitian dan pengembangan guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut BPP Kemendagri mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
- Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
- Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
- Membina Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
- Memberikan fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
- Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.

Bila melihat Struktur Organisasi ini dan fungsi yang diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri) juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan terhadap unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dimaksud, dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis ke depan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyusun Renstra Badan Penelitian dan



Pengembangan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan kelitbang, khususnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2010-2014.

Berdasarkan pasal 39 Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya manusia kelitbang terdiri dari :

i. Peneliti, terdiri dari:

- Pejabat Fungsional Peneliti.
- PNS yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbang yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

ii. Perekayasa.

iii. Tenaga lainnya, yaitu :

PNS yang diangkat dalam jabatan struktural.

- PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus lainnya selain peneliti dan perekayasa.
- PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum, dan
- Pegawai tidak tetap.

Secara keseluruhan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sampai dengan tahun 2014 berjumlah 181 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- i. 45 orang pejabat fungsional peneliti,
- ii. 1 orang pejabat fungsional perekayasa,
- iii. 62 orang pejabat struktural yang terdiri dari pejabat Eselon I (1 orang), pejabat eselon II (5 orang), pejabat Eselon III (16 orang) dan pejabat Eselon IV (40 orang),
- iv. 73 jabatan fungsional umum.

Bagian terbesar pegawai ditempatkan pada Sekretariat, karena berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka menyediakan pelayanan administrasi internal. Sebagian staf lainnya ditempatkan pada masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan, sedang staf untuk menunjang kegiatan kelompok peneliti belum tersedia.

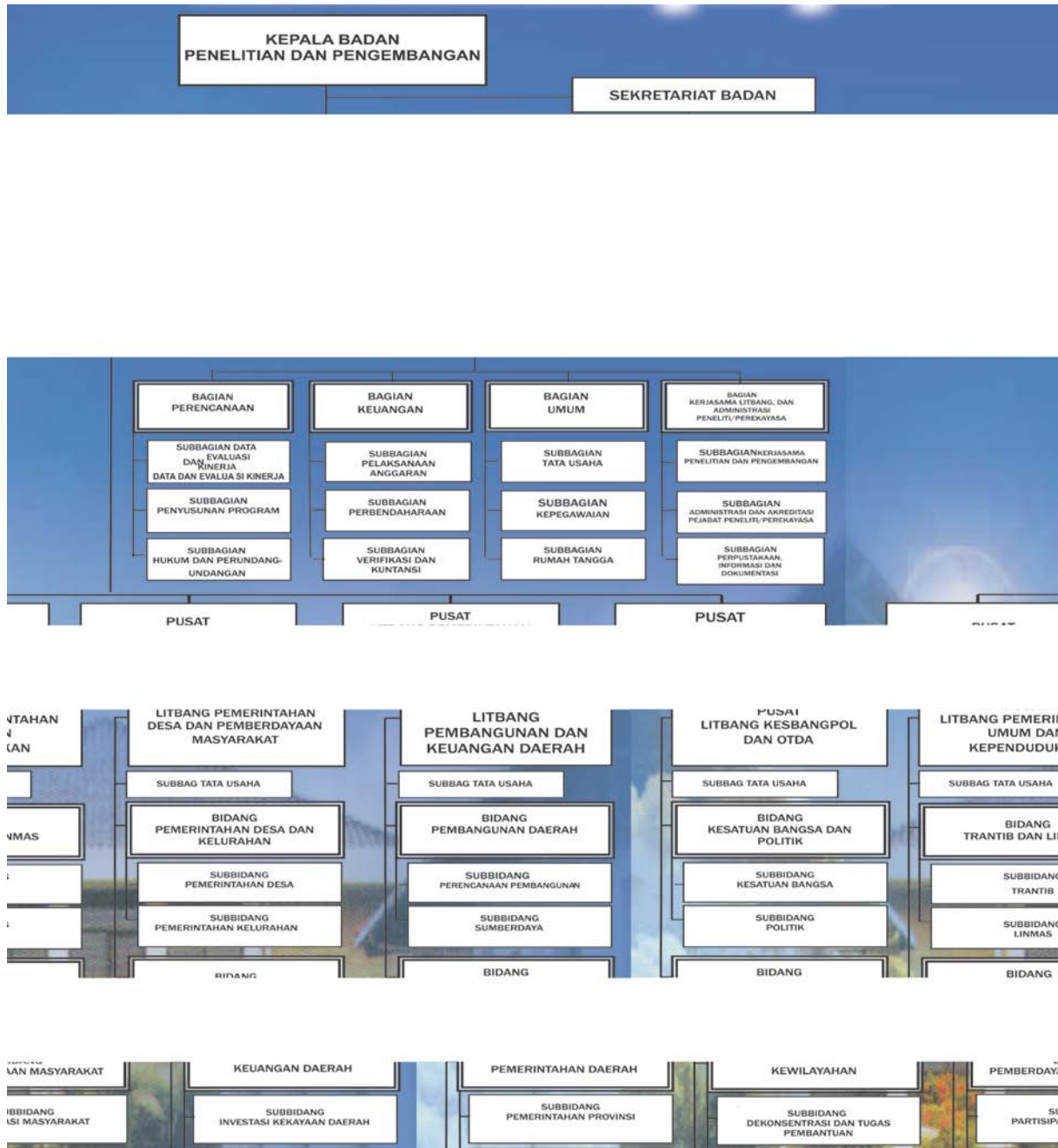
4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri yang terdiri atas:

- i. 4 Pusat Litbang terdiri dari 4 Subbag. TU, 12 bidang, dan 24 Subbidang.
- ii. 1 Sekretariat terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian.



Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan



Menyimak perkembangan dinamika pemerintahan daerah dan otonomi daerah selama diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014, memberi tantangan pelajaran bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih berperan mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah. Menyadari kondisi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sudah sepatutnya memposisikan perannya dengan upaya-upaya penelitian/kajian yang strategik yang memiliki pemicu tinggi bagi perbaikan manajemen, melalui identifikasi isu-isu strategis/pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan institusi Kementerian Dalam Negeri yang cukup sentral dan strategik untuk penciptaan iklim berpemerintahan daerah yang baik.



Secara prinsip, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2010 dilaksanakan oleh 7 (tujuh) komponen pelaksana utama, yakni:

- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bila melihat struktur organisasi ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap komponen, sehingga peran dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini dan di masa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan struktur organisasi masing-masing pusat litbang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi **mitra kerja** dari Komponen lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dari gambaran kondisi dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapat mewujudkan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga litbang yang profesional, handal dan terpercaya di bidang pemerintahan, keuangan daerah, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang diharapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan perannya secara profesional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus menjadi lini terdepan dalam perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus mampu cepat dan tepat dalam memberikan berbagai informasi dan telaahan strategis bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan dalam situasi yang mendesak/darurat.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri membutuhkan SDM peneliti yang profesional dan *concern* di bidang penelitian dan pengembangan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Program dan kegiatan penelitian harus tajam dan fokus, sehingga benar-benar dapat bermanfaat dan menjadi kebutuhan stakeholders (pimpinan dan komponen Kementerian Dalam Negeri).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS BPP 2010 - 2014.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJM Nasional 2010-2014), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, tahap kedua tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010-2014 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode lima tahun kedepan.

VISI

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah **“Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan”**.

MISI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, maka *misi* Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan daalam negeri;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;
- c. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND;
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;



- e. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

TUJUAN STRATEGIS

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. Meningkatkan pendayagunaan hasil – hasil penelitian dan pengembangan;
- c. Meningkatkan kemampuan profesionalitas SDM struktural, peneliti, perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian Kementerian/LPNL, pemerintahan daerah, dan negara/lembaga donor asing;
- f. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri;
- g. Mendorong penguatan kelembagaan, perbaikan substansi program dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan daerah.

2. RENCANA KINERJA BPP TAHUN 2014

Dalam rangka mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan, pengukuran dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan yang kemudian disesuaikan dengan target capaiannya dengan dokumen perencanaan yang kemudian target tersebut ditetapkan Melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dihadapan Menteri Dalam Negeri. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan beserta target target capaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama BPP Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.	44 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	23 Laporan
	Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbang dengan rencana kerja.	20 Laporan
	Jumlah	87 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 44.178.762.000,-

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014. PK ini sebagai Kontrak Kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2014 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2014. Jumlah target kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Kinerja BPP tahun 2014 tertulis berjumlah 88 laporan, tetapi jumlah yang sebenarnya adalah sejumlah 87 laporan. Kekeliruan tersebut terjadi pada awal perhitungan akibat terdapat kesalahan dalam penjumlahan target output/laporan pada unit kerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang semestinya sejumlah 19 laporan tetapi tertulis sebanyak 20 laporan. Oleh karena itu, setelah dilakukan koreksi, maka jumlah target kinerja keseluruhan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPP tahun 2014, yang benar dan yang semestinya adalah sebanyak 87 laporan.

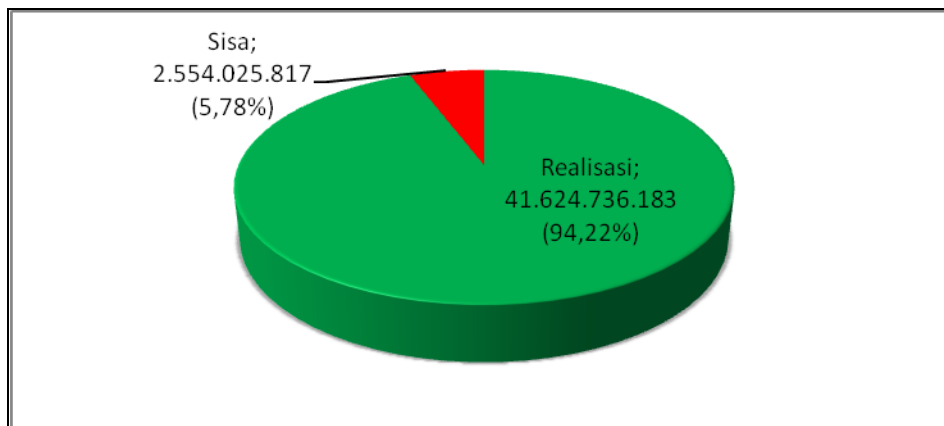


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Tahun anggaran 2014 Badan Litbang mendapat alokasi pagu anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp. 50.594.600.000,- (*Lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-11.1.403222/2014 tanggal 5 Desember 2013, Sehubungan dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Badan Litbang Kemendagri akhirnya memiliki pagu anggaran revisi sebesar Rp. 44.178.762.000,- (*Empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan semua program dan kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,22 % (*sembilan puluh empat koma dua puluh dua Persen*, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.





Sasaran Strategis BPP : Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Target dan Capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.	44 Laporan	44 Laporan	100 %
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	23 Laporan	23 Laporan	100 %
	Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.	20 Laporan	20 Laporan	100 %
	Jumlah	87 Laporan	87 Laporan	100 %



Indikator 1 : Target dan Capaian terhadap indikator kinerja 1 yaitu Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti sebagaimana pada matriks dibawah ini

KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Penelitian Model Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran (DOBHP).	1.035.700.000	1.021.840.200	98,66	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Strategis Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).	500.000.000	495.379.450	99,08	1 Laporan	1 Laporan	100
2 (dua) Kajian Taktis	800.000.000	773,310,050	96,66	2 Laporan	2 Laporan	100
a. Kajian Taktis Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).						
b. Kajian Taktis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Perda dan Perkada).						
10 (sepuluh) Kajian Aktual	1.000.000.000	977.318.550	97,73	10 Laporan	10 Laporan	100
a. Kajian Peran Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Politik Pemilu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.				1 Laporan	1 Laporan	
b. Kajian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020.				1 Laporan	1 Laporan	
c. Kajian Dampak Pemilukada Langsung terhadap Nilai Etika dan Korupsi di Indonesia.				1 Laporan	1 Laporan	
d. Kajian Konflik dan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	
e. Kajian Strategi Meningkatkan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	
f. Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah				1 Laporan	1 Laporan	
g. Kajian Peran Kominda dalam Deteksi Dini Konflik Sosial				1 Laporan	1 Laporan	
h. Kajian Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi di				1 Laporan	1 Laporan	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Indonesia.						
i. Kajian Penguatan Nilai Budaya Lokal dalam Perubahan Revolusi Mental Bangsa				1 Laporan	1 Laporan	
j. Kajian Peran Ormas sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.				1 Laporan	1 Laporan	
Penelitian :	850.000.000	827.731.500	97,38	1 laporan	1 laporan	100
Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
Kajian Strategis	400.000.000	344.458.350	86,11	1 laporan	1 laporan	100
Kapita Selektif Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Sejak Masa Kemerdekaan s.d Era Reformasi: Sebuah <i>Lesson Learned</i>						
Kajian Taktis :	1.050.000.000	911.054.550	86,77	3 laporan	3 laporan	100
a. Kajian Taktis Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah						
b. Kajian Taktis Kerjasama Daerah di Perbatasan Provinsi (Studi di Kab. Kuningan dan Kab. Brebes)						
c. Kajian Taktis Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa						
Kajian Aktual:	600.000.000	538.190.717	89,70	6 laporan	6 laporan	100
a. Kajian Aktual Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dalam Mendukung Program KB				1 laporan	1 laporan	
b. Kajian Aktual Evaluasi UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara				1 laporan	1 laporan	
c. Kajian Aktual Penerapan e-Governance untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kota Pekalongan)				1 laporan	1 laporan	
d. Kajian Aktual Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian				1 laporan	1 laporan	
e. Kajian Aktual Redefinasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat				1 laporan	1 laporan	
f. Kajian Aktual Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak				1 laporan	1 laporan	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Penelitian Formulasi Strategis Kebijakan Implementasi Regulasi tentang Desa	1.083.200.000	1.050.203.150	96,95	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Strategis Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya UU Desa Th 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)	400.000.000	359.155.250	89,79	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Aktual Implikasi Juara Lomba Desa terhadap Perkembangan Desa	100.000.000	95.358.500	95,36	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Taktis Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Umum/Generik dan Desa Adat sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	300.000.000	294.954.500	98,32	1 Laporan	1 Laporan	100
Penelitian Proporsi Belanja Modal dalam APBD	850.000.000	626.398.275	73,69	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Strategis Kerjasama Sister City dalam Pembangunan Perkotaan	400.000.000	279.458.500	69,86	1 Laporan	1 Laporan	100
Kajian Taktis		522.742.650	69,70	3 Laporan	3 Laporan	100
a. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
b. Pemanfaatan <i>Eco Economic Decoupling</i> sebagai Bahan Perumusan Kebijakan				1 Laporan	1 Laporan	
c. Kinerja Pemda di Bidang Tata Kelola Ekonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
Kajian Aktual	1.000.000.000	781.331.700	78,13	10 laporan	10 laporan	100
a. Kebijakan Penguatan Ekonomi Daerah dalam Rangka Daya Tarik Investasi				1 Laporan	1 Laporan	
b. Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Daya Saing				1 Laporan	1 Laporan	
c. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Investasi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
d. Analisis Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Mendukung Investasi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
e. Kebijakan Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil				1 Laporan	1 Laporan	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
f. Optimalisasi PAD Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
g. Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam Rangka meningkatkan Pendapatan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
h. Implementasi Transparansi Informasi Keuangan BUMD				1 Laporan	1 Laporan	
i. Kemampuan Keuangan Daerah Otonom Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
j. Kebijakan Optimalisasi Insentif dan Disinsentif dalam Rangka Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah				44 Laporan	44 Laporan	100

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja 1 "**Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti**" Badan Penelitian dan Pengembangan telah menargetkan kinerja sejumlah 44 laporan yang didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan dalam PK tahun 2014, meliputi kegiatan penelitian sejumlah 4 laporan, kajian strategis 4 laporan, kajian taktis 9 laporan dan kajian aktual 17 laporan. Adapun capaian target kinerja yang telah dilaksanakan oleh 4 Pusat dan dukungan Sekretariat dengan pencapaian kinerja sejumlah 44 laporan atau 100% meliputi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sejumlah 4 laporan, kajian strategis 4 laporan, kajian taktis 9 laporan dan kajian aktual 17 laporan dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Penelitian Model Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran (DOBHP) sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 070.04/2940/KPOTDA tanggal 20 November 2014 perihal Hasil Penelitian' Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran'.
- ✓ Kajian Strategis Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3349/LITBANG tanggal 25 November 2014 perihal Laporan Hasil Kajian' Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan'.
- ✓ Kajian Taktis Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait, dan masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.



- ✓ Kajian Taktis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Perda dan Perkada) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait, dan masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Peran Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Politik Pemilu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait, dan masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020 telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Dampak Pemilukada Langsung terhadap Nilai Etika dan Korupsi di Indonesia telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Konflik dan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Strategi Meningkatkan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Indonesia telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Peran Kominda dalam Deteksi Dini Konflik Sosial telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Penguatan Nilai Budaya Lokal dalam Perubahan Revolusi Mental Bangsa telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses



untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.

- ✓ Kajian Peran Ormas sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kapita Selekta Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Sejak Masa Kemerdekaan s.d Era Reformasi: Sebuah Lesson Learned telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Taktis Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Taktis Kerjasama Daerah di Perbatasan Provinsi (Studi di Kab. Kuningan dan Kab. Brebes) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Taktis Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Aktual Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dalam Mendukung Program KB telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Aktual Evaluasi UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Aktual Penerapan *e-Governance* untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kota Pekalongan) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui



penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.

- ✓ Kajian Aktual Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Aktual Redefinasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kajian Aktual Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3648/LITBANG tanggal 23 Desember 2014 perihal 'Hasil Pelaksanaan Pengkajian Aktual tentang Kota Layak Anak'.
- ✓ Formulasi Strategis Kebijakan Implementasi Regulasi tentang Desa sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 070.04/3368.A/LITBANG tanggal 1 Desember 2014 perihal 'Hasil Penelitian 'Formulasi Strategis Kebijakan Implementasi Regulasi tentang Desa'.
- ✓ Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya UU Desa Th 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes) sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3367.A/LITBANG tanggal 1 Desember 2014 perihal 'Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya UU Desa Th 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)'.
- ✓ Implikasi Juara Lomba Desa terhadap Perkembangan Desa sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3694/LITBANG tanggal 26 Juli 2014 perihal 'Implikasi Juara Lomba Desa terhadap Perkembangan Desa'.
- ✓ Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Umum/Generik dan Desa Adat sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3366.A/LITBANG tanggal 1 Desember 2014 perihal 'Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Umum/Generik dan Desa Adat sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa'.
- ✓ Proporsi Belanja Modal dalam APBD telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kerjasama *Sister City* dalam Pembangunan Perkotaan telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.



- ✓ Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Perencanaan Pembangunan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Pemanfaatan Eco Economic Decoupling sebagai Bahan Perumusan Kebijakan sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 073.04/3331/LITBANG tanggal 24 November 2014 perihal 'Pemanfaatan Eco Economic Decoupling sebagai Bahan Perumusan Kebijakan'.
- ✓ Kinerja Pemda di Bidang Tata Kelola Ekonomi Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kebijakan Penguatan Ekonomi Daerah dalam Rangka Daya Tarik Investasi telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Daya Saing telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Investasi Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Analisis Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Mendukung Investasi Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kebijakan Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Optimalisasi PAD Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam Rangka meningkatkan Pendapatan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang,



lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.

- ✓ Implementasi Transparansi Informasi Keuangan BUMD telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kemampuan Keuangan Daerah Otonom Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kebijakan Optimalisasi Insentif dan Disinsentif dalam Rangka Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.

Indikator 2 : Target dan Capaian terhadap indikator kinerja 2 yaitu Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti sebagaimana matriks di bawah ini

KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Focus Group Discussion (FGD)	200.000.000	194.389.900	97.19	4 Laporan	4 Laporan	100
a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/RUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019.				1 Laporan	1 Laporan	
b. Antisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2020 Berbagai Persoalan dan Implikasinya yang akan ditimbulkan.				1 Laporan	1 Laporan	
c. Pemilukada secara langsung kaitannya dengan korupsi Kepala Daerah.				1 Laporan	1 Laporan	
d. Pemilukada secara langsung kaitannya dengan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
daerah.						
Focus Group Discussion (FGD):	200.000.000	184,829,600	92,41	4 laporan	4 laporan	100
a. FGD Eksistensi Satlinmas Dalam Penanganan Bencana				1 laporan	1 laporan	
b. FGD Strategi Percepatan Penegasan Batas Daerah				1 laporan	1 laporan	
c. FGD Pencatuman Identitas Agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)				1 laporan	1 laporan	
c. FGD Pengangkatan Pejabat Struktural Dinas Dukcapil oleh Mendagri: Faedah dan Implikasinya						
Diskusi Terfokus (FGD) Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000	459.493.100	91,90	10 Laporan	10 Laporan	100
a. Penguatan Perekonomian Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)				1 Laporan	1 Laporan	
b. Aktualisasi Pemberdayaan Masyarakat: Manajemen Pendampingan dan Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat Desa Pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014				1 Laporan	1 Laporan	
c. Membedah Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Adat dan Desa Generik Pasca UU No. 6 Th 2014 tentang Desa				1 Laporan	1 Laporan	
d. Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa				1 Laporan	1 Laporan	
e. Kesiapan pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari perspektif MusrebangDes)				1 Laporan	1 Laporan	
f. Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desa Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014				1 Laporan	1 Laporan	
g. Kewenangan Pusat dan Daerah				1	1	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Korelasi dengan eksistensi Desa				Laporan	Laporan	
h. Kesiapan pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari perspektif MusrebangDes)				1 Laporan	1 Laporan	
i. Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desan Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014				1 Laporan	1 Laporan	
j. Tata Kelola Keuangan Desa dalam Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa				1 Laporan	1 Laporan	
k. Posisi Desa Dalam Revisi Undang-undang tentang Pemerintahan Desa				1 Laporan	1 Laporan	
l. Identifikasi dan Pemetaan : Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Korelasi dengan Revisi UU Pemerintahan Daerah)				1 Laporan	1 Laporan	
Focus Group Discussion (FGD)	250.000.000	211.457.450	84,58	5 laporan	5 laporan	100
a. Pemetaan Sumber-sumber Eco Economic Decoupling dalam rangka Mengurangi Tekanan Terhadap Lingkungan dan Sumber Daya di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
b. Tata Kelola Keuangan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
c. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif				1 Laporan	1 Laporan	
d. Peran Kelembagaan dalam Investasi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
e. Penataan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)				1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah				23 Laporan	23 Laporan	100

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja 2, **"Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti"** Badan Penelitian dan Pengembangan telah menargetkan kinerja sebanyak 23 laporan yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK BPP Tahun 2014, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh 4 Pusat



Litbang dan dukungan Sekretariat di lingkungan BPP Kemendagri dengan pencapaian kinerja atas hasil pelaksanaan kegiatan FGD sejumlah 23 laporan atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/RUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Antisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2020 Berbagai Persoalan dan Implikasinya yang akan ditimbulkan telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Pemilukada secara langsung kaitannya dengan korupsi Kepala Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Pemilukada secara langsung kaitannya dengan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ FGD Eksistensi Satlinmas Dalam Penanganan Bencana sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 080/1028/LITBANG tanggal 11 April 2014 perihal Hasil Hasil Pelaksanaan Focussed Group Discussion (FGD) 'Eksistensi Satlinmas Dalam Penanganan Bencana'.
- ✓ FGD Strategi Percepatan Penegasan Batas Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ FGD Pencatuman Identitas Agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ FGD Pengangkatan Pejabat Struktural Dinas Dukcapil oleh Mendagri: Faedah dan Implikasinya telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Penguatan Perekonomian Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sudah



ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 080.04/3692/LITBANG tanggal 29 April 2014 perihal Hasil Hasil Pelaksanaan Focussed Group Discussion (FGD) 'Penguatan Perekonomian Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)'.

- ✓ Aktualisasi Pemberdayaan Masyarakat: Manajemen Pendampingan dan Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat Desa Pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 080.04/3696/LITBANG tanggal 29 Desember 2014 perihal Hasil Hasil Pelaksanaan Focussed Group Discussion (FGD)' Aktualisasi Pemberdayaan Masyarakat: Manajemen Pendampingan dan Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat Desa Pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014'.
- ✓ Membedah Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Adat dan Desa Generik Pasca UU No. 6 Th 2014 tentang Desa sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 080.04/3695/LITBANG tanggal 29 Desember 2014 perihal Hasil Hasil Pelaksanaan Focussed Group Discussion (FGD)' Membedah Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Adat dan Desa Generik Pasca UU No. 6 Th 2014 tentang Desa'.
- ✓ Tata Kelola Keuangan Desa dalam Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa sudah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. 080.04/3693/LITBANG tanggal 29 Juli 2014 perihal Hasil Hasil Pelaksanaan Focussed Group Discussion (FGD)' Penata Kelolaan Keuangan Desa Dalam Regulasi Desa'.
- ✓ Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kesiapan pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari perspektif MusrembangDes) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desan Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Kewenangan Pusat dan Daerah Korelasi dengan eksistensi Desa telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.



- ✓ Kesiapan pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif MusrembangDes) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desan Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Posisi Desa Dalam Revisi Undang-undang tentang Pemerintahan Desa telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Identifikasi dan Pemetaan : Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Korelasi dengan Revisi UU Pemerintahan Daerah) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Pemetaan Sumber-sumber Eco Economic Decoupling dalam rangka Mengurangi Tekanan Terhadap Lingkungan dan Sumber Daya di Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Tata Kelola Keuangan Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Peran Kelembagaan dalam Investasi Daerah telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.
- ✓ Penataan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah diseminarkan dengan melibatkan komponen terkait masih dalam tahap proses untuk dipublikasikan melalui penerbitan Jurnal Badan Litbang, lab data Badan Litbang Kemendagri dan penyusunan hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri serta ditindaklanjuti.



Indikator 3 : Target dan Capaian indikator kinerja 3 yaitu Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja

KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi Puslitbang Kesbangpol dan Otda	930.650.000	925.830.650	99,48	5 Laporan	5 Laporan	100
a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi				1 Laporan	1 Laporan	
b. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda				1 Laporan	1 Laporan	
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda				1 Laporan	1 Laporan	
d. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda				1 Laporan	1 Laporan	
e. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda				1 Laporan	1 Laporan	
Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi Puslitbang Pum dan Kependudukan	918.200.000	872.845.400	95,06	5 laporan	5 laporan	100
a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi				1 Laporan	1 Laporan	
b. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	
d. Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	
e. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	
Pembinaan dan atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan bidang Pemdes dan Pemmas	1.145.300.000	1.114.279.500	97,29	5 laporan	5 laporan	100
a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi				1 Laporan	1 Laporan	



KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
		(Rp)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
b. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas				1 Laporan	1 Laporan	
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemdes dan Pemmas				1 Laporan	1 Laporan	
d. Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas				1 Laporan	1 Laporan	
e. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas				1 Laporan	1 Laporan	
Pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	845.450.000	822.440.750	97,28	5 laporan	5 laporan	100
a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi				1 Laporan	1 Laporan	
b. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah		efisiensi		1 Laporan	1 Laporan	
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
d. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
e. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah				20 Laporan	20 Laporan	100

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja 3 "Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja" Badan Penelitian dan Pengembangan dengan target kinerja sejumlah 20 laporan yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPP tahun 2014, meliputi a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, b) Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, c) Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, d) Evaluasi Capaian Kinerja oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, e) Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan. Adapun capaian kinerja terhadap indikator kinerja 3 atas



hasil pelaksanaan kegiatan dengan target 20 laporan, dan yang telah dilaksanakan oleh 4 Pusat dan dukungan Sekretariat adalah telah tercapai sejumlah 20 laporan atau 100%. Pencapaian kedua puluh output/laporan dimaksud meliputi hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi yang dilaksanakan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi yang dilaksanakan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional yang dilaksanakan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, hasil Evaluasi Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan, hasil Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh 4 Pusat sebanyak 4 laporan dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan bidang kesbangpol terdiri atas rapat konsultasi dengan komponen terkait dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
- ✓ Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda mencakup penyiapan administrasi, perjalanan dinas pimpinan ke daerah untuk mengawal pelaksanaan penelitian serta Penyusunan Laporan Triwulan I-IV dan kegiatan Monitoring Evaluasi Pusat Kesbangpol dan Otda.
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda berisi kegiatan rutin ke tatasahaan Pusat Kesbangpol dan Otda selama 12 bulan layanan.
- ✓ Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda berupa penyusunan LAKIP Tahun 2013 serta Rencana Program dan Kegiatan Pusat Kesbangpol dan Otda Tahun 2015.
- ✓ Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Kesbangpol dan Otda, kegiatan ini terdiri atas kegiatan sejenis Bintel dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/innovator terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Peneliti lingkup Kesbangpol dan Otda.
- ✓ Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan bidang Pumdruk terdiri atas rapat dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang.
- ✓ Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pumdruk mencakup penyiapan administrasi, perjalanan dinas pimpinan ke daerah serta Penyusunan Laporan Triwulan I-IV dan kegiatan Monitoring Evaluasi Pusat pelaksanaan kegiatan Pusat Pumdruk.
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Pumdruk berisi kegiatan rutin ke tata usahaan Pusat Litbang Pumdruk selama 12 bulan layanan.
- ✓ Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pumdruk berupa penyusunan LAKIP Tahun 2013 serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Pusat Pumdruk.
- ✓ Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Pumdruk, kegiatan ini terdiri atas kegiatan sejenis Bintel dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/innovator terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Peneliti.
- ✓ Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan bidang Pemdes dan Pemmas terdiri atas rapat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.



- ✓ Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pemdes dan Pemmas mencakup penyiapan administrasi, perjalanan dinas pimpinan ke daerah serta Penyusunan Laporan Triwulan I-IV dan kegiatan Monitoring Evaluasi Pusat Pemdes dan Pemmas.
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas berisi kegiatan rutin ke tata usahaan Pusat Pemdes dan Pemmas selama 12 bulan layanan.
- ✓ Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pemdes dan Pemmas berupa penyusunan LAKIP Tahun 2013 serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Pusat Pemdes dan Pemmas.
- ✓ Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Pemdes dan Pemmas, kegiatan ini terdiri atas kegiatan sejenis Bintek dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/innovator terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Peneliti Pusat Pemdes dan Pemmas.
- ✓ Pelaksanaan Forum Konsultasi Teknis Substansi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan bidang Bangkeuda terdiri atas rapat dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang.
- ✓ Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Bangkeuda mencakup penyiapan administrasi, perjalanan dinas pimpinan ke daerah serta Penyusunan Laporan Triwulan I-IV dan kegiatan Monitoring Evaluasi Pusat Bangkeuda.
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Bangkeuda berisi kegiatan rutin ke tata usahaan pusat Bangkeuda selama 12 bulan layanan.
- ✓ Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Bangkeuda berupa penyusunan LAKIP Tahun 2013 serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Pusat Bangkeuda.
- ✓ Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bangkeuda kegiatan ini terdiri atas kegiatan sejenis Bintek dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang dengan menghadirkan Pakar/Praktisi/innovator terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Peneliti Pusat Bangkeuda.



i. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPP Tahun 2010-2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014		TAHUN 2013		TAHUN 2012		TAHUN 2011		TAHUN 2010	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.	44 Laporan	44 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	64 Laporan	64 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	52 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	23 Laporan	23 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan
	Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014		TAHUN 2013		TAHUN 2012		TAHUN 2011		TAHUN 2010	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>
	dengan rencana kerja.										
	Pagu Anggaran	50.594.600.000	44.178.762.000	67.068.426.000	60.447.072.541	50.322.705.000	40.848.619.386	33.191.800.000	31.998.376.455	30.244.754.000	27.018.614.932
	Prosentase	94.22 %		90.13 %		81.17 %		96.40 %		89.33 %	
	Jumlah Laporan	87 Laporan	87 Laporan	83 Laporan	83 Laporan	104 Laporan	104 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan
	Prosentase	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

Mencermati matrik di atas, meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta capaian target kinerja Badan Litbang Kemendagri dari tahun 2010-2014, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Selama periode dua tahun yaitu dari tahun 2010 dan 2011, besaran jumlah target kinerja/output Badan Litbang Kemendagri adalah jumlahnya sama, yaitu masing-masing sebesar 92 laporan dan masing-masing target output tersebut telah terealisasi 100%;
- Pada periode tahun 2012 besaran jumlah target kinerja/output Badan Litbang Kemendagri sebesar 104 laporan dan dibandingkan dengan target kinerja/output tahun 2011 sebesar 92 laporan, jadi mengalami peningkatan target kinerja/output sebesar 12 laporan, dan target output tersebut telah terealisasi 100%;
- Pada periode tahun 2013 besaran jumlah target kinerja/output Badan Litbang Kemendagri sebesar 83 laporan dan dibandingkan dengan target kinerja/output tahun 2012 sebesar 104 laporan, jadi mengalami penurunan target kinerja/output sebesar 21 laporan, dan target output tersebut telah terealisasi 100%;
- Sedangkan periode tahun 2014 besaran jumlah target kinerja/output Badan Litbang Kemendagri sebesar 87 laporan dan dibandingkan dengan target kinerja/output tahun 2013 sebesar 83 laporan, jadi mengalami peningkatan target kinerja/output sebesar 4 laporan, dan target output tersebut telah terealisasi 100%;
- Dilihat dari dukungan anggaran, bahwa besaran pagu anggaran Badan Litbang Kemendagri dari tahun ke tahun selama periode empat tahun yakni dari tahun 2010 s/d 2013, cenderung mengalami peningkatan jumlah anggaran, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2014.
- Dilihat dari tingkat penyerapan anggaran selama periode tahun 2010 s/d 2014, berkisar antara 81,17% s/d 96,40%. Penyerapan terendah yaitu sebesar 81,17% terjadi pada tahun 2012, dan penyerapan tertinggi sebesar 96,40% terjadi pada tahun 2011.



ii. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara keseluruhan pagu anggaran Badan Litbang Kemendagri semula sebesar Rp. 50.594.600.000,- , setelah terbit Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Badan Litbang Kemendagri memiliki pagu anggaran revisi sebesar Rp. 44.178.762.000,-. Hingga per 31 Desember 2014 total penyerapan anggaran mencapai Rp. 41.624.736.182 ,- atau sebesar 94,22%, dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.554.025.818,- (Dua milyar lima ratus lima puluh empat juta dua puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Adapun beberapa kendala dalam penyerapan anggaran Badan Litbang Tahun 2014 antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran BPP Kemendagri Tahun 2014 masih terblokir hingga tanggal 24 Februari 2014, mengakibatkan pelaksanaan anggaran tidak bisa dilakukan selama 2 (dua) bulan, sehingga penyerapan anggaran terlambat;
- b. Regulasi, sistem dan mekanisme program kegiatan mengalami perubahan dan mengakibatkan terjadi kecenderungan pencairan anggaran program kegiatan menjadi agak lambat, sehingga pelaksanaan program kegiatan pun terkendala pembiayaan;
- c. Adanya perubahan pagu anggaran pada masing-masing unit kerja sebagai konsekuensi penghematan anggaran;
- d. Masih kurangnya pemahaman pengelola kegiatan tentang penerapan PTO kelitbangan karena baru diterapkan pada Maret tahun 2014;
- e. Proses penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan dalam proses pencairan realisasi anggaran pada pusat-pusat;
- f. Pertanggungjawaban suatu kegiatan dari pengelola kegiatan sering berubah-ubah sehingga mempengaruhi perubahan jadwal kegiatan yang telah disepakati
- g. Adanya pemotongan/efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, sehingga terjadi pengurangan pagu anggaran;
- h. Adanya sisa pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan yang disebabkan oleh batasan jumlah realisasi pelelangan dan beberapa sub kegiatan yang tidak terbayarkan, misalnya honor narasumber, honor peserta yang tidak hadir;
- i. Menindaklanjuti Nota Dinas Menteri Dalam Negeri No 910/6405/SJ tanggal 11 November 2014 perihal Kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Kemendagri Tahun 2014 dan Tahun 2015 dimana beberapa kegiatan paket meeting dalam kota dan luar kota tidak dapat dilaksanakan karena revisi DIPA dan POK untuk mendapatkan persetujuan Menteri dibatasi waktu pada akhir tahun anggaran.

Sebagai tindaklanjut dalam mengatasi permasalahan di atas Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya penyelesaian sebagai berikut:



- a. Telah dilakukan percepatan revisi anggaran di Kanwil DJA Kementerian Keuangan;
- b. Telah dilakukan penyesuaian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dengan regulasi dan mekanisme KPN yang baru, sebagai langkah awal Badan Litbang telah mengirimkan surat kepada Kepala KPPN untuk mempercepat proses pencairan anggaran;
- c. Telah dilakukan koordinasi secara intensif dan komprehensif agar penerapan PTO kelitbang dapat lebih mudah dijalankan oleh Pusat-Pusat Litbang Lingkup Badan Litbang Kemendagri;
- d. Telah dilakukan pembinaan SOP kegiatan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Badan Litbang namun belum disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi, konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- f. Telah dilakukan segera penyesuaian dan reviu jadwal kegiatan.

iii. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja dan optimalisasi penyerapan anggaran program kegiatan di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri kedepannya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilingkungan Badan Litbang diperlukan upaya peningkatan koordinasi, konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Diperlukan perbaikan mekanisme SAKIP dan instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Perlu dilakukan peningkatan dan penajaman indikator kinerja agar perhitungan dan evaluasi kinerja dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Hal tersebut perlu pula diikuti dengan perbaikan terhadap pelaksanaan mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang sinergis dengan sistem akuntabilitas kinerja;
- d. Perlu menentukan target yang realistis yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan penyediaan anggaran pembiayaan yang sesuai dengan beban target yang ditentukan;
- e. Dibutuhkan penataan dan konsistensi antara program dan kegiatan, serta antara kegiatan pokok Renstra dengan uraian kegiatan tahunan baik yang diuraikan dalam DIPA maupun dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) agar setiap kegiatan dapat berkontribusi secara hirarkhi dan terstruktur terhadap sasaran yang ditargetkan;
- f. Perlu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Litbang dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas untuk mencapai optimalisasi kinerja Badan Litbang yang disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;



- g. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik maka pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja;
- h. Diupayakan proses pelelangan mendapatkan hasil sehemat mungkin namun memberikan keuntungan baik output terhadap kegiatan dan honor narasumber, dan honor peserta yang tidak hadir yang anggarannya telah dicairkan dikembalikan ke kas negara;
- i. Diupayakan dilakukan revisi anggaran dan diusulkan untuk perubahan beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan menyangkut belanja barang dan belanja bahan.



2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN REVISI (Rp.)	REALISASI	TARGET OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT	
				Rp.	%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan							
	SEKRETARIAT	32.911.300.000	28.070.262.000	26.940.283.941	95,97	5 Dokumen, 52 Laporan, 1Peraturan, 12 Bulan Layanan, 14 Unit 2.298m2	5 Dokumen, 52 Laporan, 1Peraturan, 12 Bulan layanan, 14 Unit 2.298m2	100%
	1. BAGIAN PERENCANAAN	3.883.448.000	2.280.570.000	2.271.174.925	99,59			
	2. BAGIAN UMUM	11.374.023.000	8.676.637.000	7.924.778.234	91,33			
	3. BAGIAN KEUANGAN	14.895.481.000	14.227.058.000	13.944.998.772	98,02			
	4. BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN	2.758.348.000	2.885.997.000	2.799.332.010	97,00			
B	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil kegiatan kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri							
	1. PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA	4.735.700.000	4.466.350.000	4.388.068.800	98,25	23 Laporan	23 Laporan	100%
	2. PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN	4.143.000.000	4.018.200.000	3.679.110.117	91,56	20 Laporan	20 Laporan	100%
	3. PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS	4.257.500.000	3.528.500.000	3.373.444.000	95,61	19 Laporan	19 Laporan	100%
	4. PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA	4.547.100.000	4.095.450.000	3.243.829.325	79,21	25 Laporan	25 Laporan	100%
	JUMLAH	50.594.600.000	44.178.762.000	41.624.736.183	94,22			



Realisasi anggaran BPP Kemendagri Tahun 2014 sebesar **Rp. 41.624.736.183,-** (*Empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*) atau **94,22 %** dari pagu anggaran revisi BPP Kemendagri sebesar Rp. 44.178.762.000.

Hingga per 31 Desember 2014 total penyerapan anggaran Badan Litbang Kemendagri mencapai Rp. 41.624.736.183,- (*Empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*) atau sebesar 94,22 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 44.178.762.000,- (*Empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.554.025.817,- (*Dua milyar lima ratus lima puluh empat juta dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) atau 5,75%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

a. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

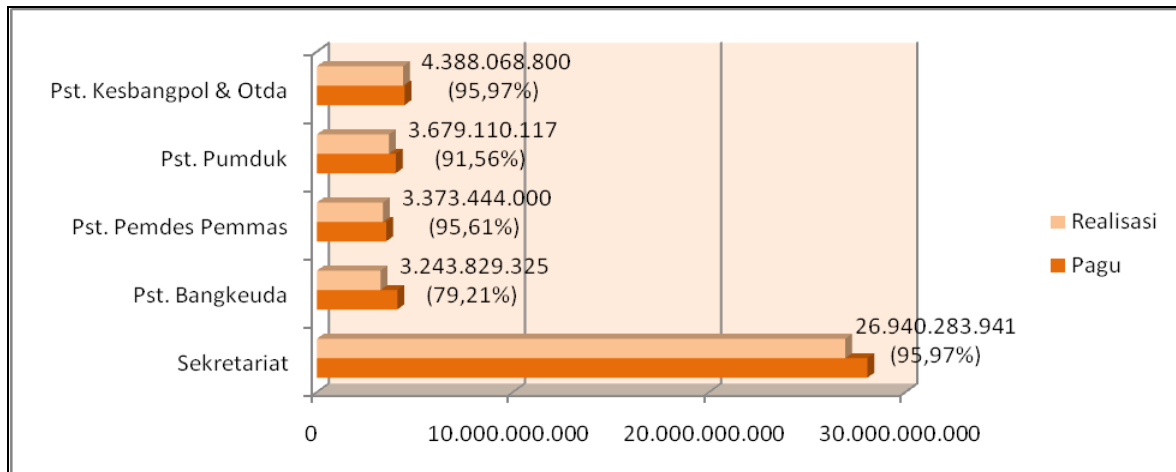
- i. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, realisasi anggaran sebesar Rp.26.940.283.941,- (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*) atau sekitar 95,97% dari anggaran sebesar Rp. 28.070.262.000,- (*Dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil kegiatan kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri

- i. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.388.068.800,- (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) atau sekitar 98,25% dari anggaran sebesar Rp. 4.466.350.000,- (*Empat milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- i. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, realisasi sebesar Rp. 3.679.110.117,- (*Tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas rupiah*) atau sekitar 91,56% dari anggaran sebesar Rp. 4.018.200.000,- (*Empat milyar delapan belas juta dua ratus ribu rupiah*)
- ii. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.373.444.000,- (*Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*) atau sekitar 95,61% dari anggaran sebesar Rp. 3.528.500.000,- (*Tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- iii. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan daerah, realisasi anggaran Rp. 3.243.829.325,- (*Tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) atau 79,21 % dari anggaran sebesar Rp. 4.095.450.000,- (*Empat milyar sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).



Pada tahun 2014, realisasi anggaran per unit Eselon II dapat dilihat pada gambar berikut.



Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPP

Realisasi terbesar terdapat di Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.388.068.800,- atau 98,25% dari pagu sebesar Rp. 4.466.350.000,-. Sementara realisasi anggaran terkecil berada pada Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah sebesar Rp.3.243.829.325,- atau 7,21% dari pagu sebesar Rp.4.095.450.000,-.

Jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2013, terdapat kenaikan sebesar **4,09%** pada Tahun 2014 ini.



BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk melihat kemampuan instansi tersebut dalam pemanfaatan sumberdaya yang dikelola dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan

Mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri memiliki target kinerja sejumlah 87 Laporan dan realisasi sebesar 87 Laporan atau 100%, sedangkan target pagu anggaran berdasarkan revisi sebesar Rp. 44.178.762.000 dan realisasi penyerapan anggran sebesar Rp. 41.624.736.183 atau 94,22%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.554.025.817,- merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di hotel, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan kegiatan di kantor berakibat pada penghematan anggaran yang tercermin dari sisa anggaran yang tidak terserap. Dengan diterapkannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, penyelenggaraan Kelitbangan pada tahun 2014 relatif dapat terlaksana secara efektif, tertib, teratur dan terkendali.

Berdasarkan capaian yang diperoleh dari kinerja unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan akan menjadi media umpan balik bagi peningkatan kinerja dan tindaklanjut perencanaan program maupun kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu dilihat efektifitasnya kontribusinya dalam pencapaian tujuan Kementerian sehingga dapat dijadikan daya dorong dalam perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih efektif pada masa mendatang

2. SARAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2014, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- i. Secara umum kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan lagi ditahun 2015.
- ii. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka meningkatkan kebersamaan dalam persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan program agar lebih fokus terintegrasi, dan komprehensif untuk pengendalian kinerja dan mendorong kontribusi capaian kinerja yang lebih baik terhadap seluruh kegiatan
- iii. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai



dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dalam mendukung tercapainya visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan.

- iv. Kinerja Badan Litbang Tahun 2014 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang.
- v. Pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Drs. SAHAT MARULITUA, MA**, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di **Badan Penelitian dan Pengembangan** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

**Menyaksikan
KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

ttd

Drs. AHMAD ZUBAIDI, M.Si

**Jakarta, Januari 2014
Pembuat Pernyataan
SEKRETARIS BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

ttd

Drs. SAHAT MARULITUA, MA



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET 3
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.	44 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	23 Laporan
	Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelibangan dengan rencana kerja.	20 Laporan
	Jumlah	87 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 44.178.762.000,-

Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)

Jakarta, Januari 2014
KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ttd

Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si
NIP. 19550419 198003 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan	1. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran	3 dokumen, 1 laporan
	2. Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	4 Laporan
	3. Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan	1 peraturan, 2 laporan
	4. Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan	4 Laporan
	5. Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	2 Laporan
	6. Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	12 Bulan
	7. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya	8 Laporan
	8. Prosentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang	1 Laporan
	9. Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP	1 Dokumen
	10. Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN	3 Laporan
	11. Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP	2 Laporan
	12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kemitbangan	5 Laporan
	13. Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti	3 Laporan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	dan perekayasa sesuai standar yang berlaku	
	14. Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	6 laporan, 1 dokumen
	15. Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan)	7 Laporan
	16. Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah	5 Laporan
	17. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	13 unit, 1 paket, 2298 m ²

Jumlah Anggaran : **Rp. 28.070.262.000,-**

Komponen Input : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, Januari 2014

**SEKRETARIS BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Ttd

Drs. SAHAT MARULITUA, MA



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUDA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	15 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	5 Laporan
	Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	5 Laporan
	Jumlah	25 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.095.450.000,-
Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)
Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan KEUDA (1280)

Jakarta, Januari 2014
Kapus Litbang Pembangunan dan KEUDA
Badan Penelitian dan Pengembangan

Ttd
Indrajaya Ramzie, SH. M.Si
NIP. 19660225 199103 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PUSAT LITBANG KESBANGPOL DAN OTDA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	14 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	4 Laporan
	Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah	5 Laporan
	Jumlah	23 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.466.350.000,-
Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)
Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan OTDA (1281)

Jakarta, Januari 2014
Kapus Litbang Kesbangpol & OTDA
Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Mangala Sihite, SH, MM
NIP. 19541128 198503 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PUSAT LITBANG PUM DAN KEPENDUDUKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	11 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	4 Laporan
	Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan	5 Laporan
	Jumlah	20 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.018.200.000,-
Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)
Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan PUM dan Kependudukan (1282)

Jakarta, Januari 2014
Kapus Litbang PUM dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan

Ttd

Drs. Sugeng Hariyono, M. Pd
NIP. 19661017 199203 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

**PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PUSAT LITBANG PEMDES DAN PEMMAS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	4 Laporan
	Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemdes dan Pemmas yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	10 Laporan
	Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Laporan
	Jumlah	19 Laporan

Jumlah Anggaran : **Rp. 3.528.500.000,-**
Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)
Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemdes dan Pemmas (1283)

Jakarta, Januari 2014
Kapus Litbang Pemdes dan Pemmas
Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd
Drs. Domoe Abdie, M.Si
NIP. 19561030 198203 1 001



Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

1. BAGIAN PERENCANAAN

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
1.	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	2.280.570.000	2.271.174.925	99,72	3Dokumen 1 Laporan	3Dokumen 1 Laporan	100
	a) Perencanaan Program dan Anggaran						
	1) Penyusunan RENJA-KL BPP Tahun 2015				1 Dokumen	1 Dokumen	
	2) Penyusunan Program Litbang Tahun 2015				1 Dokumen	1 Dokumen	
	3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2015				1 Laporan	1 Laporan	
	b) Penyusunan Renstra				1 Dokumen	1 Dokumen	
	1) Penyesuaian Renstra Badan Litbang dengan RPJMN Tahun 2015-2019						
2.	Laporan Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan	616.178.000	615.858.600	99,43	4 Laporan	4 Laporan	100
	a) Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2014				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2014						
	b) Evaluasi Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan Pemdagri di Lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Evaluasi Pemanfaatan Hasil-hasil penelitian dan Pengembangan Pemdagri di Lingkungan Pemda						
	c) Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013						
	d) Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri		Efisiensi		1 Laporan	1 Laporan	
	1) Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri						



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%	OUTPUT	OUTPUT	%
3.	Laporan Pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan	199.360.000	199.005.750	99,82	3 Laporan	3 Laporan	100
	a) Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (Lab Litbang)						
	1) Penyelenggaraan Kegiatan SIM (Jaringan Lab) BPP Kemendagri				1 Laporan	1 Laporan	
	2) Himpunan dan Penyusunan Bank Data Kemendagri dan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
	b) Pengelolaan Website Lab Data Litbang BPP Kemendagri TA 2014				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Pengelolaan Website Lab Data Litbang BPP Kemendagri TA 2014						
4.	Laporan Pembinaan (Fasilitasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemda	149.793.000	144.944.005	96,76	1 Laporan	1 Laporan	100
	a) Penyelenggaraan Fasilitasi Majelis Pertimbangan dan Pengendalian Mutu dan Forum Wacana Kelitbangan Kemendagri				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Majelis Pertimbangan dan Pengendali Mutu						
	2) Forum Wacana Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri		Efisiensi				
5.	Peraturan Bidang Kelitbangan	691.535.000	689.433.815	99,70	1 Peraturan, 2 Laporan	1 Peraturan, 2 Laporan	100
	a) Penyusunan dan / atau Penyempurnaan Per UU - an						
	1) Penyusunan, Penyempurnaan dan Sosialisasi Per UU-an Kelitbangan				1 Peraturan	1 Peraturan	
	b) Dukungan Kegiatan Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri				1 Laporan	1 Laporan	



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%		OUTPUT	%
	1) Penyusunan dan Evaluasi Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri						
	c) Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Lingkup BPP Kemendagri Kemendagri		Efisiensi				
	d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan						

Bagian Perencanaan dengan pagu anggaran revisi sebesar Rp. 2.280.570.000,-, realisasi mencapai Rp. 2.271.174.925,- (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau 99,59%

2. BAGIAN UMUM

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%		OUTPUT	%
1.	Dokumen SOP	66.950.000	55.507.000	82,91	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	a) Administrasi Kegiatan Penyusunan SOP BPP Kemendagri						
	b) Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) BPP Kemendagri		Efisiensi				
2.	Laporan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Tugas Teknis Lainnya	722.612.000	541.144.250	74,89	8 laporan	8 laporan	100
	a) Pemutakhiran Data dan Updating Data Kepegawaian				1 laporan	1 laporan	
	1) Pemutakhiran Data dan Updating Data Simpeg						
	b) Pembinaan Pegawai di Lingkungan BPP Kemendagri				2 laporan	2 laporan	
	1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%		OUTPUT	%
	2) Rekrutmen dan Evaluasi Pegawai Tidak Tetap (Konsultan & Supporting Staf Administrasi)						
	3) Bimbingan Teknis Prestasi Kinerja PNS BPP						
	c) Fasilitasi Pengembangan SDM di Lingkungan BPP				1 laporan	1 laporan	
	1) Fasilitasi Pengembangan SDM di Lingkungan BPP						
	d) Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian				2 laporan	2 laporan	
	1) Tim BAPERJAKAT						
	2) Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Eselon IV di Lingkungan BPP Kemendagri						
	e) Penyelenggaraan Pengamanan Dalam				1 laporan	1 laporan	
	f) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan				1 laporan	1 laporan	
	1) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan BPP Kemendagri						
2.	Laporan Penyelesaian dan Penatausahaan Arsip Sesuai dengan Sim Arsip	141.200.000	90.120.000	63,82	2 laporan	2 laporan	100
	a) Inventarisasi Arsip Aktif dan Inaktif				1 laporan	1 laporan	
	1) Inventarisasi Arsip Aktif						
	b) Pengiriman Surat/Dokumen				1 laporan	1 laporan	
3.	Laporan Pembinaan (Fasilitasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemda	841.664.000	799.073.952	94,94	1 laporan	1 laporan	
	a) Rapat - rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi				1 laporan	1 laporan	
	1) Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Rapat Kerja Pimpinan Badan Litbang						



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%		OUTPUT	%
	2) Terselenggaranya Kegiatan Humas, Protokol dan Pemberitaan						
4.	Laporan BMN Sesuai Simak BMN	153.890.000	25.446.700	16,54	3 Laporan	3 Laporan	100
	a) Administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Sesuai Simak BMN						
	1) Penyusunan Laporan BMN sesuai Simak BMN				2 lap semester ,1 lap tahunan	2 lap semester ,1 lap tahunan	
5.	Layanan Perkantoran	3.799.229.000	3.464.030.720	91,18	12 bulan layanan	12 bln layanan	100
	a) Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu						
	1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Makan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Poliklinik / Obat - obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan Gedung Kantor 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Peralatan dan Mesin 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK) Barang Cetak, Alat, RT, Langganan Majalah 						



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			JUMLAH (RP)	%		OUTPUT	%
	<ul style="list-style-type: none">Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10						
	<ul style="list-style-type: none">Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2						
	<ul style="list-style-type: none">Langganan Daya dan Jasa						
	<ul style="list-style-type: none">Jasa Keamanan dan Kebersihan						
	<ul style="list-style-type: none">Dukungan Pelayanan Kesehatan						
6.	Kendaraan Bermotor	-	Efisiensi		0	0	0
7.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51.180.000	49.544.000	96.80	14 unit	14 unit	100
	a) Alat Studio & Komunikasi				14 Unit	14 Unit	
8.	Gedung / Bangunan	2.899.911.612	2.899.911.612	100	2.298m²	2.298m²	100
	a) Pembangunan Lanjutan Gedung BPP Kemendagri						

Bagian Umum dengan pagu anggaran revisi sebesar Rp. 8.676.637.000,- realisasinya mencapai Rp.7,924,778,234,- (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) atau **91,33%**

3. BAGIAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			(RP)	%		OUTPUT	&
1.	Laporan Keuangan dan Aset serta Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	933.074.000	846.427.950	90,71	7 laporan	7 laporan	100
	a. Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran				1 laporan	1 laporan	
	b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan				3 laporan	3 laporan	
	1) Pembinaan Manajemen Pengelolaan Keuangan						



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
			(RP)	%	OUTPUT	OUTPUT	&
	bagi Badan Litbang						
	2) Tim Kerja Rekonsiliasi Data LRA dengan Instansi Terkait						
	3) Sosialisasi Peraturan/Pembekalan Pelaksanaan Anggaran						
	4) Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Negara						
	5) Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran						
	c. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri				3 laporan	3 laporan	
	1) Rakornis Penyusunan dan Pembahasan serta Finalisasi SBK Tahun 2015						
	2) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BPP			Efisiensi			
	3) Fasilitasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) di Lingkungan BPP Kemendagri			Efisiensi			
2.	Laporan Keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	1.163.103.000	1.017.420.900	87,47	1 dokumen, 6 laporan	1 dokumen, 6 laporan	100
	a. Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP				1 dokumen	1 dokumen	
	1) Penyusunan/Perumusan Revisi PO Tahun 2014						
	2) Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis						
	b. Pembinaan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut				2 laporan	2 laporan	
	c. Penyelesaian Laporan Keuangan yang sesuai Sistem				4 laporan (1 laporan	4 laporan (1	



NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN		TARGET	CAPAIAN	
			(RP)	%	OUTPUT	OUTPUT	&
	Akuntansi Keuangan (SAK)				bulanan, 1 laporan triwulan, 1 laporan semesteran, dan 1 laporan tahunan)	laporan bulanan, 1 laporan triwulan, 1 laporan semesteran, dan 1 laporan tahunan)	
3.	Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu	12.130.881.000	12.081.149.922	99,59	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100

Bagian Keuangan dengan pagu anggaran revisi sebesar Rp. 14.227.058.000,- realisasinya mencapai Rp.13.944.998.772,- (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau **98,02%**

4. BAGIAN K LAP/P

No.	Kegiatan	PAGU	Realisasi Anggaran		TARGET	CAPAIAN	
			Jumlah (Rp)	%	OUTPUT	Output	
1.	Laporan Pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan	7.010.000	7.010.000	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	a) Pembelian Buku dan Pencetakan / Penggandaan Buku - buku / Peraturan Baru				1 Laporan	1 Laporan	
2.	Laporan Peningkatan Kualitas Media Publikasi Kelitbang (Media Cetak & Elektronik) dalam 1 Tahun	907.024.000	901.188.000	99,36	2 laporan	2 laporan	100
	a) Administrasi Kegiatan Penerbitan Jurnal Bina Praja dan Media BPP					2 laporan	
	1) Sekretariat Jurnal Bina Praja dan Media BPP Kemendagri						
	2) Penerbitan Media BPP Kemendagri				1 Laporan	1 Laporan	



No.	Kegiatan	PAGU	Realisasi Anggaran		TARGET	CAPAIAN	
			Jumlah (Rp)	%	OUTPUT	Output	
	3) Penerbitan Jurnal Bina Praja				1 Laporan	1 Laporan	
3.	Laporan Provinsi / Kab / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kelitbangan melalui Forum Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Kelitbangan	693.886.000	674.222.950	97,17	5 laporan	5 laporan	100
	a) Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota)				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota)						
	b) Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA						
	c) Forum Konsultasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Program, Manajemen dan Peneliti/Perekayasa Lingkup Kelitbangan Kemendagri dan Pemerintah Daerah				3 laporan	3 laporan	
	1) Rapat Kerja Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD)				1 Laporan	1 Laporan	
	2) Pengelolaan Perpustakaan				1 Laporan	1 Laporan	
	3) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK)				1 Laporan	1 Laporan	
	d) Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang)				1 laporan	1 laporan	
4.	Laporan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa sesuai Standar yang berlaku	305.931.000	267.495.630	87,44	3 laporan	3 laporan	100
	a) Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Peneliti / Perekayasa				1 Laporan	1 Laporan	
	1) Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Peneliti / Perekayasa						
	b) Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda		Efisiensi		1 laporan	1 laporan	



No.	Kegiatan	PAGU	Realisasi Anggaran		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			Jumlah (Rp)	%		Output	
	1) Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda						
	c) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan				1 laporan	1 laporan	
	1) Program Fasilitasi Kerjasama Pusat dan Daerah						
	2) Monitoring dan Evaluasi Program Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan Pusat Daerah (SPM)		Efisiensi				
5.	Laporan Pembinaan (Fasilitasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi) Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemda	902.146.000	889.865.310	98,64	3 laporan	3 laporan	100
	a) Monitoring / Supervisi / Asistensi Perekayasa Permasalahan SDM Peneliti / Perekayasa, Pengangkatan, Mutasi, Pembebasan dan Pemberhentian				3 laporan	3 laporan	
	1) Monitoring Permasalahan SDM Peneliti / Perekayasa Pengangkatan, Mutasi, Pembebasan dan Pemberhentian				1 Laporan	1 Laporan	
	2) Peningkatan Kapasitas Kelitbangan BPP Kemendagri dan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
	3) Bintek Substansi dan Non Substansi Litbang BPP Kemendagri dan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	
6.	Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu	70.000.000	59.550.120	85,07	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100
	a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
	1) Penyelenggaraan Kepustakaan						
	2) Pengawetan Buku-buku						



No.	Kegiatan	PAGU	Realisasi Anggaran		TARGET OUTPUT	CAPAIAN	
			Jumlah (Rp)	%		Output	
	Peraturan/Pemeliharaan/Perawatan Perpustakaan						

Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa dengan pagu anggaran revisi sebesar Rp. 2.885.997.000,- ealisasinya mencapai Rp. 2.799.332.010,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sepuluh Rupiah*) atau **97,00%**